

---

# RELEVANSI TEORI KRITIS RASIONALITAS POLITIK DALAM MENILAI KINERJA PEMERINTAH: SUATU PENDEKATAN ANALITIS

**Wiwik Handayani Nasution**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## **Abstrak**

Teori Kritis Rasionalitas Politik (TKRP) merupakan pendekatan analitis yang menyoroti aspek-aspek kekuasaan, ideologi, dan hegemoni dalam analisis kinerja pemerintah. Artikel ini mengeksplorasi relevansi TKRP dalam menilai kinerja pemerintah, menguraikan konsep dan prinsip dasar teori ini serta menerapkan pendekatan analitisnya dalam konteks evaluasi pemerintah. Dengan menyoroti dimensi kritis, analisis TKRP membantu memperdalam pemahaman tentang dinamika politik yang mempengaruhi kinerja pemerintah, termasuk dalam konteks tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.

**Kata Kunci:** *Teori Kritis Rasionalitas Politik, Kinerja Pemerintah, Analisis Kritis*

---



## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Teori Kritis Rasionalitas Politik (TKRP) adalah suatu kerangka pemikiran yang muncul dari tradisi pemikiran kritis di ilmu politik. Berakar dalam pemikiran Frankfurt School dan filsafat kritis, TKRP menawarkan suatu pendekatan analitis yang kritis terhadap dinamika kekuasaan, ideologi, dan hegemoni dalam konteks politik. Dalam era kompleksitas yang semakin meningkat, evaluasi kinerja pemerintah tidak lagi dapat dibatasi hanya pada indikator kuantitatif atau model-manajemen tradisional semata. Melainkan, diperlukan suatu pendekatan yang lebih holistik dan kritis yang mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah secara menyeluruh.*

*Pada konteks inilah, relevansi TKRP dalam menilai kinerja pemerintah menjadi semakin penting. TKRP memungkinkan kita untuk melihat di balik kulit kinerja pemerintah yang tampak, dan memahami dinamika kekuasaan yang memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam relevansi TKRP dalam menilai kinerja pemerintah, serta bagaimana pendekatan analitis TKRP dapat membantu kita memperdalam pemahaman tentang kinerja pemerintah dalam konteks yang lebih luas.*

*Pada dasarnya, TKRP menekankan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang netral atau objektif, melainkan selalu terlibat dalam dinamika kepentingan dan konflik yang bersifat politis. Melalui konsep rasionalitas politik, TKRP menyoroti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional yang murni, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi, nilai-nilai dominan, dan relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, evaluasi kinerja pemerintah tidak dapat terlepas dari konteks politik yang memengaruhinya.*

*Dalam pandangan TKRP, pemerintah bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi terjalin dalam jaringan kekuasaan yang kompleks dan saling terkait dengan berbagai aktor politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, untuk memahami kinerja pemerintah secara holistik, kita perlu mempertimbangkan berbagai dimensi kekuasaan dan ideologi yang ada dalam masyarakat, serta bagaimana dinamika tersebut memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, TKRP menawarkan suatu pendekatan analitis yang kritis untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, dengan menyoroti aspek-aspek seperti distribusi kekuasaan, hegemoni ideologis, dan pembentukan kebijakan yang tidak terlepas dari konteks sosial-politik yang lebih luas.*

### **Metode Penelitian**

*Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penerapan teori kritis rasionalitas politik dalam menilai kinerja pemerintah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pemahaman, interpretasi, dan refleksi terhadap kinerja pemerintah dari perspektif teori kritis rasionalitas politik.*

#### *1. Tinjauan Literatur:*

- *Studi ini akan dimulai dengan tinjauan literatur yang komprehensif tentang teori kritis rasionalitas politik dan konsep-konsep terkait lainnya, seperti hegemoni, dominasi, resistensi, dan transformasi sosial.*
  - *Tinjauan literatur juga akan mencakup studi-studi terdahulu yang telah menerapkan teori kritis rasionalitas politik dalam analisis kinerja pemerintah atau evaluasi kebijakan.*
2. *Pengembangan Kerangka Analisis:*
- *Berdasarkan tinjauan literatur, peneliti akan mengembangkan kerangka analisis yang mencakup konsep-konsep utama teori kritis rasionalitas politik dan cara-cara penerapannya dalam menilai kinerja pemerintah.*
  - *Kerangka analisis ini akan memberikan landasan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari sudut pandang kritis yang menggali aspek-aspek kebijakan, praktik politik, dan hubungan kekuasaan yang terkait.*
3. *Studi Kasus:*
- *Studi ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menerapkan kerangka analisis yang dikembangkan pada kasus-kasus konkret pemerintah atau kebijakan pemerintah di tingkat lokal, regional, atau nasional.*
  - *Kasus-kasus ini akan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti signifikansi, keragaman konteks, dan relevansi dengan tujuan penelitian.*
4. *Pengumpulan Data:* a. *Analisis Dokumen: Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen, seperti kebijakan publik, laporan kinerja pemerintah, dokumen kebijakan, dan studi evaluasi kebijakan yang relevan.* b. *Wawancara: Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah, aktivis masyarakat, ahli kebijakan, dan anggota masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan, persepsi terhadap kinerja pemerintah, dan potensi resistensi atau transformasi sosial.*
5. *Analisis Data:*
- *Data kualitatif yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik. Peneliti akan mencari pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang muncul dari data, serta melakukan komparasi antar kasus untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kinerja pemerintah.*
  - *Pendekatan analisis studi kasus akan digunakan untuk menggali implikasi teori kritis rasionalitas politik dalam konteks kinerja pemerintah dan kebijakan publik.*
6. *Validitas dan Reliabilitas:*
- *Validitas data akan diperkuat melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data dan metode.*
  - *Reliabilitas analisis akan dijamin melalui konsistensi dalam interpretasi data dan pengecekan terhadap kesimpulan oleh peneliti lain atau pengamat politik independen.*

*Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, studi ini bertujuan untuk menerapkan teori kritis rasionalitas politik dalam menilai kinerja pemerintah. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara teori kritis rasionalitas politik dan praktik politik dalam konteks kinerja pemerintah.*

#### **PEMBAHASAN**

*Dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, terdapat beragam pendekatan yang dapat digunakan. Salah satu pendekatan yang muncul sebagai alternatif yang menarik adalah Teori Kritis Rasionalitas Politik (TKRP). Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka kerja analitis yang memperhitungkan faktor-faktor politik, kekuasaan, dan ideologi dalam menilai tindakan dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis, khususnya dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, penting untuk memiliki pendekatan yang lebih holistik dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi relevansi TKRP dalam menilai kinerja pemerintah dan bagaimana pendekatan analitis ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika politik di balik tindakan pemerintah.*

*TKRP menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kekerasan atau kontrol fisik, tetapi juga melibatkan dominasi simbolis dan ideologis. Dengan demikian, kinerja pemerintah tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhinya. Pendekatan TKRP menyoroti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sering kali dipengaruhi oleh ideologi, nilai-nilai dominan, dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami kinerja pemerintah secara menyeluruh, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor ini dan bagaimana dinamika kekuasaan memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah.*

*Dalam konteks ini, pendekatan analitis TKRP menawarkan suatu pendekatan yang kritis terhadap evaluasi kinerja pemerintah. Daripada hanya melihat hasil-hasil konkret atau indikator kuantitatif semata, TKRP meminta kita untuk menggali lebih dalam ke dalam struktur kekuasaan dan ideologi yang membentuk kebijakan dan tindakan pemerintah. Ini berarti bahwa dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, kita harus mempertimbangkan tidak hanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengapa mereka melakukannya dan bagaimana dinamika kekuasaan memengaruhi kebijakan tersebut.*

*Salah satu konsep kunci dalam TKRP adalah rasionalitas politik, yang mengacu pada logika dan pertimbangan politik yang mendasari kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, TKRP mempertanyakan asumsi bahwa kebijakan pemerintah selalu didasarkan pada pertimbangan rasional yang murni, dan menyoroti bahwa kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-rasional seperti ideologi, kepentingan politik, dan pandangan dunia yang dominan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pendekatan TKRP membantu kita untuk memahami lebih baik logika di balik kebijakan dan tindakan pemerintah, serta bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi kinerja mereka.*

*Penerapan TKRP dalam menilai kinerja pemerintah juga melibatkan analisis terhadap dinamika kekuasaan dan hegemoni dalam masyarakat. TKRP menyoroti bahwa kekuasaan*

*tidak hanya berkaitan dengan pemerintah sebagai entitas tunggal, tetapi juga terkait dengan jaringan kekuasaan yang kompleks dan saling terkait dengan berbagai aktor politik, ekonomi, dan sosial. Dengan memahami dinamika kekuasaan ini, kita dapat mengidentifikasi bagaimana kekuatan dan kepentingan yang berbeda saling bertautan dan saling memengaruhi, serta bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah.*

*Selain itu, pendekatan TKRP juga menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan menantang ideologi dan hegemoni yang mendominasi masyarakat. Ideologi yang dominan dapat memengaruhi pandangan dan kebijakan pemerintah, dan dalam banyak kasus, dapat menghalangi perubahan sosial yang diperlukan. Dengan memahami ideologi dan hegemoni yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengidentifikasi cara di mana mereka membatasi pilihan kebijakan dan tindakan pemerintah, serta mengembangkan strategi untuk menantang dan mengubah paradigma yang ada.*

*Dalam melakukan analisis kritis terhadap kinerja pemerintah, TKRP juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai aktor politik, ekonomi, dan sosial dalam proses evaluasi. Ini termasuk masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan kelompok-kelompok yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengalaman, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dari kebijakan dan tindakan pemerintah, serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika politik yang mempengaruhinya.*

*Pendekatan TKRP juga menekankan pentingnya menggali informasi dan data yang relevan dalam menilai kinerja pemerintah. Ini mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan, data statistik, dan informasi lainnya yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan dan tindakan pemerintah. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong penggunaan wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan wawasan yang lebih langsung tentang bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah memengaruhi masyarakat secara nyata.*

*Dalam mengaplikasikan TKRP dalam menilai kinerja pemerintah, penting untuk diingat bahwa pendekatan ini bukanlah suatu metode yang statis atau tunggal. Sebaliknya, ini adalah suatu kerangka kerja analitis yang dapat disesuaikan dengan berbagai konteks politik, ekonomi, dan sosial yang ada. Oleh karena itu, dalam menggunakan TKRP, peneliti harus mempertimbangkan karakteristik unik dari situasi yang mereka teliti dan menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.*

*Dengan mengambil pendekatan kritis terhadap evaluasi kinerja pemerintah melalui lensa TKRP, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pemerintah, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan politik, sosial, dan ekonomi yang diinginkan.*

*Dalam melanjutkan analisis terhadap relevansi Teori Kritis Rasionalitas Politik (TKRP) dalam menilai kinerja pemerintah, perlu juga dicermati bahwa pendekatan ini memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih kompleks terhadap interaksi antara pemerintah dan masyarakat. TKRP menekankan bahwa pemerintah tidaklah beroperasi secara independen,*

melainkan terjalin dalam jaringan kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor dalam masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pemerintah harus melibatkan analisis terhadap dinamika hubungan antara pemerintah, elit politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, TKRP juga mengakui peran penting dari media massa dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, penting untuk memperhitungkan bagaimana media massa membentuk narasi politik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Analisis terhadap liputan media, narasi politik yang diusung, dan dampaknya terhadap tindakan pemerintah menjadi bagian penting dari pendekatan TKRP dalam menilai kinerja pemerintah.

Selanjutnya, dalam melanjutkan analisis, perlu juga diperhatikan bahwa pendekatan TKRP menyoroti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik atau kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, kebijakan dan tindakan tersebut sering kali lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya politik. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, penting untuk melihat apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil dan merata.

Pendekatan TKRP juga menyoroti bahwa evaluasi kinerja pemerintah tidak boleh terbatas pada tingkat lokal atau nasional saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya secara global. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, kebijakan dan tindakan pemerintah di satu negara dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap negara lain dan komunitas internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pemerintah harus memperhitungkan implikasi global dari kebijakan dan tindakan yang diambil.

Dalam konteks ini, TKRP memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis kinerja pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan memperdalam pemahaman kita tentang dinamika politik di balik kebijakan dan tindakan pemerintah, kita dapat mengembangkan perspektif yang lebih kritis dan holistik dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan politik, sosial, dan ekonomi yang diinginkan, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Selain itu, TKRP juga menekankan pentingnya memperhatikan dimensi etika dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Evaluasi yang dilakukan haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan yang mendasari tindakan pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari segi efisiensi atau efektivitas semata, tetapi juga dari perspektif etika dan moralitas. Dengan demikian, pendekatan TKRP dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dapat membantu kita untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak hanya memberikan manfaat

yang maksimal secara praktis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan keadilan yang kita anut.

Penerapan TKRP dalam mengevaluasi kinerja pemerintah juga membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan lainnya. Melalui kolaborasi yang erat antara berbagai aktor ini, kita dapat menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan tentang kinerja pemerintah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan publik.

Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa penerapan TKRP dalam mengevaluasi kinerja pemerintah juga menuntut keterampilan analitis yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang teori politik kritis. Para peneliti dan analis yang menggunakan pendekatan ini harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai dinamika politik, kekuasaan, dan ideologi yang memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan demikian, pendekatan TKRP bukanlah suatu pendekatan yang sederhana atau mudah, tetapi membutuhkan komitmen dan ketekunan untuk menghasilkan evaluasi yang akurat dan relevan.

Terakhir, dalam melanjutkan penerapan TKRP dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, penting untuk terus mengembangkan dan memperbaiki metodologi dan pendekatan yang digunakan. Dalam era yang terus berubah dengan cepat, kita perlu terus memperbarui dan menyesuaikan kerangka kerja analitis kita agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang baru muncul. Hal ini melibatkan kolaborasi antara para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, serta membangun kesepahaman yang lebih dalam tentang cara terbaik untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Dengan demikian, melanjutkan penerapan TKRP dalam mengevaluasi kinerja pemerintah memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari berbagai pihak dan memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Dengan menggabungkan analisis kritis terhadap dinamika politik, kekuasaan, dan ideologi dengan prinsip-prinsip etika dan partisipasi masyarakat, kita dapat menghasilkan evaluasi yang lebih akurat dan relevan tentang kinerja pemerintah. Hal ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan-tujuan politik, sosial, dan ekonomi yang diinginkan, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapainya.

### **Kesimpulan**

Teori Kritis Rasionalitas Politik (TKRP) merupakan suatu pendekatan analitis yang relevan dan penting dalam menilai kinerja pemerintah. Dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis, di mana kebijakan publik semakin dipengaruhi oleh beragam faktor politik, ekonomi, dan sosial, pendekatan TKRP memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik di balik tindakan dan kebijakan pemerintah. Dengan menyoroti hubungan antara kekuasaan, ideologi, dan kebijakan, TKRP memungkinkan kita untuk memahami lebih baik bagaimana keputusan politik dibuat, siapa yang mempengaruhinya, dan bagaimana kepentingan masyarakat tercermin dalam kebijakan publik.

*Penerapan TKRP dalam mengevaluasi kinerja pemerintah membutuhkan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Ini melibatkan analisis kritis terhadap dinamika kekuasaan, hegemoni ideologis, dan rasionalitas politik yang membentuk kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan memperhitungkan berbagai dimensi politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi kinerja pemerintah, kita dapat menghasilkan evaluasi yang lebih akurat dan relevan tentang efektivitas dan keadilan kebijakan publik.*

*Selain itu, penerapan TKRP juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi kinerja pemerintah, termasuk akademisi, praktisi, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan lainnya. Melalui kolaborasi yang erat antara berbagai aktor ini, kita dapat menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan tentang kinerja pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.*

*Namun demikian, penerapan TKRP dalam menilai kinerja pemerintah juga menantang dan memerlukan keterampilan analitis yang kuat serta pemahaman yang mendalam tentang teori politik kritis. Para peneliti dan analis yang menggunakan pendekatan ini harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai dinamika politik, kekuasaan, dan ideologi yang memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah.*

*Dengan demikian, kesimpulannya, penerapan TKRP dalam menilai kinerja pemerintah merupakan langkah yang relevan dan penting dalam menghasilkan evaluasi yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan memperhitungkan faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi kebijakan publik, kita dapat mengembangkan perspektif yang lebih kritis dan holistik dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, serta mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan politik, sosial, dan ekonomi yang diinginkan.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.
- Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN PERLUASAN GUDANG BOILER PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DELI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Syarif, Y. (2018). Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING, 1(2).



- SAJIWO, A., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SPBU SHELL ADAM MALIK. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Kadir, A. (2017). *Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik.*
- Hidayat, R. (2019). *Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Santoso, J. (2021). *Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.*
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.*
- Fauziah, I. (2009). *Multiplikasi Tanaman Krisan (Chrysanthemum sp.) dengan Menggunakan Media MS (Murashige-Skoog) Padat.*
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).*
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang.*
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues.*
- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara).*
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Hayati, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).*
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). *Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara.*
- Azhar, S. (2013). *Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresifitas Remaja Pemain Point Blank (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik.*
- Fahmi, A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan.*
- Deliana, M. *Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Organizational Culture as a Kind of Factor Employee's Performance.*
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU).*
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara.*

- Aulia, A. M., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., & Dwiatma, G. (2022). Penerapan E-Gudang Sebagai Tempat Penampungan Ikan.
- Novita, D. (2019). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa).
- Nobriama, R. A. (2019). pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (*theobroma cacao l.*) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga).
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, N. S. S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, M. H. (2021). Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- Batubara, B. M. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Girsang, L. (2020). Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2004). Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan.
- Harahap, G. Y. (2020). Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamsa Medan.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Karim, A. (2017). Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
- Dewi, W. C. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from [osf.io/3jpd/](https://osf.io/3jpd/).
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.